

Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru

Indra Budi Setiawan^{1*}, Husaini Usman² 

^{1,2}Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 19, 2022

Revised June 20, 2022

Accepted July 30, 2022

Available online August 25, 2022

Kata Kunci:

Pola Manajemen Pendidikan,
Zonasi, Penerimaan peserta
didik baru

Keywords:

Pattern of Education
Management, Zoning, New
Student Admission



This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by
Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi menggunakan jarak sebagai syarat utama, bukan lagi seleksi berdasarkan kemampuan. Zonasi pendidikan dapat dilihat dari sisi sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada siswa dari kelas sosial ekonomi rendah untuk masuk ke sekolah yang memiliki peserta didik dari sosial ekonomi campuran dapat meningkatkan prestasi akademik mereka. Pengimplementasian penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi menjadi sebuah topik yang cukup penting untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data melalui kredibilitas, konfirmabilitas, dependabilitas, dan transferabilitas. Analisis data menggunakan model Miles & Huberman. Hasil penelitian ini adalah pola manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi meliputi pola: perencanaan PPDB, pengorganisasian PPDB, pelaksanaan PPDB, dan pengawasan PPDB. Kesimpulannya adalah pola implementasi kebijakan zonasi penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai aturan yang berlaku dan aspek-aspek manajemen. Manajemen PPDB berbasis zonasi dapat dianalisis dengan teori fungsi manajemen pendidikan milik Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

ABSTRACT

Admission of new students based on zoning uses distance as the primary requirement; no more comprehensive selection is based on ability. Educational zoning can be seen from the socioeconomic side, providing opportunities for students from low socioeconomic classes to enter schools that have students from mixed socioeconomic classes to improve their academic achievement. Implementing zoning-based acceptance of new students is a topic that is quite important to study. This study aims to analyze the zoning policy's implementation pattern on the acceptance of new students. This research uses a qualitative approach with the type of case study. Collecting data using interviews, observation, and documentation. Data validity through credibility, confirmability, dependability, and transferability. Data analysis using Miles & Huberman model. The results of this study are the zoning-based management pattern of new student admissions, including the pattern of PPDB planning, PPDB organizing, PPDB implementation, and PPDB supervision. The conclusion is that the pattern of implementation of the new student admission zoning policy runs according to the applicable rules and management aspects. Zoning-based PPDB management can be analyzed with Terry's theory of educational management functions: planning, organizing, implementing and supervising.

1. PENDAHULUAN

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi menggunakan jarak sebagai syarat utama, bukan lagi seleksi berdasarkan kemampuan (Kosasih Ali Abu Bakar et al., 2019; Safarah & Wibowo, 2018). Zonasi pendidikan dapat dilihat dari sisi sosial ekonomi, memberikan kesempatan kepada siswa dari kelas sosial ekonomi rendah untuk masuk ke sekolah yang memiliki peserta didik dari sosial ekonomi campuran dapat meningkatkan prestasi akademik mereka (Elizabeth L. Bouzarth et al., 2017). Selain itu, dengan memperpendek jarak tempuh siswa menuju ke sekolah, berkorelasi positif terhadap peningkatan fisik para siswa (Habiby & Fiatun, 2020; Mohammad Thoha & Ghazali, 2020). Ketika setengah dari seluruh

*Corresponding author

E-mail addresses: indra898@gmail.com (Indra Budi Setiawan)

siswa bersekolah di sekolah terdekat, biaya perjalanan cenderung menurun. Kesehatan masyarakat cenderung membaik akibat dampak dari meningkatnya perjalanan aktif (jalan kaki dan bersepeda) di antara anak-anak dan mengurangi perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Peningkatan akses dan kualitas bagi masyarakat kurang dari kelas sosial ekonomi rendah diharapkan terjadi di Indonesia melalui diberlakukannya PPDB berbasis zonasi.

Namun ditemukan juga sebuah fakta lapangan adanya faktor penghambat pengimplementasian sistem zonasi yaitu adanya kesenjangan pemahaman masyarakat atau orang tua mengenai pemahaman PPDB berbasis zonasi. Di sisi lain, sistem zonasi memiliki dua dampak negatif yaitu membuat sekolah yang baik menjadi kurang baik karena komponen utama dalam PPDB tidak lagi berdasarkan prestasi akademik, dan membatasi siswa dalam memilih sekolah (Harususilo, 2019; Wijaya et al., 2020). Beberapa hal yang menjadi kendala dalam PPDB berbasis zonasi adalah belum tersosialisasikan dengan baik, kendala oleh faktor teknis, kapasitas sekolah yang kurang, dan disparitas yang tinggi antar sekolah (Hoerudin, 2019; Safarah & Wibowo, 2018). Meski demikian, pemerintah tetap mewajibkan bagi setiap sekolah untuk melaksanakan PPDB berbasis zonasi terlepas dari ditemukannya kendala dalam pengimplementasiannya. Harapannya kebijakan tersebut mampu memberikan akses yang lebih setara dan berkeadilan kepada peserta didik, tanpa melihat latar belakang kemampuan ataupun perbedaan status sosial ekonomi. Semua anak bangsa memiliki hak yang sama, sehingga tidak boleh ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan layanan pemerintah (Alfian, 2019; Harususilo, 2019). Kenyataannya (*das sein*), kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh karena berbagai permasalahan seperti, pemerintah daerah menghadapi masalah terkait dengan masalah ketimpangan dalam kapasitas dan potensi siswa sekolah, sehingga sering terjadi kelebihan dan kekurangan siswa atau ruang kelas (Bakar et al., 2019; Riswan & Wibowo, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan pada sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga, kepala sekolah menyebutkan bahwa adanya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru merupakan tantangan baru. Sebab pelaksanaan zonasi membawa sistem pendaftaran baru, teknis baru, dan keberagaman peserta didik yang cukup banyak. Sehingga, sekolah dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan berbagai perencanaan agar kuota penerimaan peserta didik tidak menurun. Selain itu adanya sistem zonasi menimbulkan berbagai masalah baru baik bagi sekolah dan masyarakat. Masalah yang timbul di tengah masyarakat adalah ketidakpahaman terkait teknis pendaftaran sistem zonasi yang dilakukan secara online dan beberapa kali ditemukan pendaftar semu atau pendaftar yang tidak melanjutkan pada tahap daftar ulang pendaftaran. Selain itu fakta lapangan juga menyebutkan bahwa awal periode dilaksanakannya PPDB berbasis zonasi berimbas pada penurunan pendaftar, namun pada tahun-tahun setelahnya SMP Negeri 5 Salatiga berhasil meningkatkan angka pendaftar. Permasalahan di atas juga terjadi di SMP Negeri 7 Salatiga. Pada awal-awal pelaksanaan PPDB berbasis zonasi terjadi penurunan angka pendaftar. Masalah yang cukup krusial juga dirasakan oleh SMP Negeri 7 bahwa adanya sistem zonasi ini menjadikan sekolah SMP Negeri 7 sebagai pilihan terakhir setelah tidak diterima pada sekolah-sekolah yang notabene dicap favorit. Maka, esensi dari kebijakan zonasi belum dapat menghilangkan stigma sekolah favorit jauh lebih baik dibandingkan sekolah tidak favorit.

Manajemen penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu ruang lingkup manajemen sekolah (Nurviana et al., 2021; Rohmah et al., 2021). Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan para anggota organisasi dan penggunaan berbagai sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Sedangkan peserta didik adalah sebagai komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Mulyani et al., 2020; Wardhana & Supriyoko, 2019). Manajemen peserta didik berarti upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah, dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Pengelolaan tersebut bertujuan menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berhasil sesuai dengan tujuan sekolah (Aryantini et al., 2018; Lisnawati, 2017). Perencanaan adalah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan mendatang untuk mencapai tujuan (Hoerudin, 2019; Puspitasari et al., 2021). Perencanaan, dianggap sebagai fungsi utama manajemen, karena meliputi semua hal yang dilakukan manajer. Perencanaan menjadi kontribusi besar untuk melakukan fungsi manajemen lainnya. Pengorganisasian adalah menindaklanjuti perencanaan dengan dibantu oleh seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya dan memberikan pengembangan serta pelayanan pada mereka yang menunjang. Dalam fungsi pengorganisasian, dilakukan penetapan aktivitas, membagi pekerjaan dan tugas yang lebih spesifik, serta menentukan siapa yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan tugas tertentu (Arif, 2020; Hanifah, 2018). Pengorganisasian terjadi beberapa kegiatan yaitu menentukan anggota, menentukan struktur organisasi, dan mendelegasikan tugas. Pemberdayaan guru dan staf sekolah sebagai panitia PPDB merupakan salah satu bentuk manajemen sumber daya manusia.

Pelaksanaan/penggerakan adalah keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau untuk bekerja dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Pengontrolan merupakan pengawasan perkembangan organisasi pada unit kerja untuk mencapai tujuan dengan bentuk evaluasi. Pengawasan meliputi pemantauan, penilaian, dan pelaporan (E. L Bouzarth et al., 2017; Handani & Frinaldi, 2020). Berbicara kebijakan baru dalam PPDB, penting kiranya untuk memahami bagaimana kebijakan diawasi. Pengawasan kebijakan memiliki tiga dimensi yaitu monitoring kebijakan atau pengawasan kebijakan, evaluasi kebijakan, dan pengganjaran kebijakan. Monitoring atau pengawasan berupa pemantauan dengan penilaian untuk tujuan pengendalian pelaksanaan, agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi (Nurjaningsih, 2019; Perdana, 2019).

Temuan penelitian sebelumnya, sistem penerimaan, tak lepas dari dari lingkungan yang menjadi dampak langsung atau tidak langsung dari berjalannya sistem tersebut. Dikutip dari berbagai jurnal ilmiah bahwasanya PPDB dengan sistem zonasi dapat menimbulkan dampak negatif dan dampak positif (Pöder et al., 2017; Safarah & Wibowo, 2018). Implementasi PPDB berbasis zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan menyebutkan bahwa pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di Provinsi Sulawesi Tengah telah berhasil dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan (Handani & Frinaldi, 2020). Sebaran siswa dari sisi jarak sudah mendekat ke rumah siswa dan dari sisi mutu input juga telah menyebar di berbagai sekolah sehingga sudah tidak ada lagi dikotomi sekolah unggulan dan non unggulan (Perdana, 2019; Novrian, 2018). Implementasi kebijakan dalam PPDB dengan menggunakan sistem zonasi dapat dikatakan cukup maksimal dalam pemerataan pendidikan, penghapusan kastanisasi dan favoritisme sudah terlaksana, walaupun pola pikir masyarakat terhadap sekolah unggulan belum dapat berubah (Handani & Frinaldi, 2020). Namun di sejumlah daerah PPDB berbasis zonasi juga sukses menghilangkan paradigma bersekolah di sekolah favorit (Bakar et al., 2019). Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas zonasi adalah ketersediaan sumber daya yang dimiliki sekolah (Riswan & Wibowo, 2020; Syakarofath et al., 2020). Maka penelitian, ini bertujuan untuk menganalisis pola implementasi kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin mengungkap manajemen satuan pendidikan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Jenis penelitian ini sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan, sebab peneliti akan melihat dan menelaah terkait pola manajemen PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga. Subyek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan orang tua siswa di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga. Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan aktivitas yang terjadi SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga. Metode pengumpulan data penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mula-mula peneliti mewawancarai kepala sekolah mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dari keempat fungsi manajemen. Kemudian hasil wawancara tersebut divalidasi melalui wawancara kepada wakil kepala sekolah, dan guru. Wawancara terhadap ketiga informan ini disebut triangulasi sumber. Kemudian wawancara dilakukan terus menerus sebanyak tiga kali dengan pertanyaan wawancara yang sama sehingga didapatkan data yang jenuh. Setelah itu dilakukan observasi lapangan yang berkaitan dengan pola perencanaan PPDB, pola pengorganisasian PPDB, pola pelaksanaan PPDB, pola pengawasan PPDB yang diterapkan saat ini. Pengamatan dimulai dengan hal-hal yang umum yakni mengenai situasi kerja, lingkungan sekolah, hingga setiap aktivitas PPDB berlangsung. Tahapan dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan foto-foto situasi dan aktivitas sekolah yang berkaitan dengan pola manajemen sekolah dalam melaksanakan PPDB berbasis zonasi.

Analisis data pada penelitian ini meliputi empat aspek yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dan instrumen berupa panduan wawancara, panduan observasi dan pencermatan dokumentasi. Kemudian, pada kondensasi data mengakomodir data yang relevan dengan manajemen PPDB, memfokuskan pada manajemen yang dilakukan kepala sekolah, membuat catatan klasifikasi dan mengedit jawaban dari informan sebagaimana adanya, dan membuat catatan refleksi dengan cara mendiskusikan antara hasil temuan dengan teori manajemen satuan pendidikan. Penyajian data penelitian ini peneliti upayakan menarasikannya dengan sederhana dan mudah dipahami dengan berbantuan tabel dan gambar. Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan ketika data di lapangan berubah maka penelitian dapat melakukan verifikasi penarikan kesimpulan dengan cara kembali ke lapangan dan mengambil data kembali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi didapatkan pola manajemen penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi yang saat ini diterapkan SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Salatiga. Perencanaan yang dilakukan pertama adalah perencanaan jangka pendek, yaitu penyusunan proposal yang berisi, peraturan dan petunjuk teknis, sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan, *budgeting*, penetapan daya tampung, sosialisasi/promosi sekolah, susunan panitia, dan *job description* panitia. Kemudian perencanaan tata ruang, yaitu mempersiapkan tempat khusus di luar ruangan bagi tamu yang difungsikan untuk membantu tamu tersebut dalam pendaftaran online dan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19.

Perencanaan selanjutnya adalah perencanaan proyek, yaitu melakukan promosi atau sosialisasi sekolah ke SD terdekat. Bahkan, SMP Negeri 7 melakukan sejumlah inovasi sebagai daya tarik sekolah untuk mensukseskan PPDB yaitu pengadaan transportasi jemput siswa, dan pengadaan lomba tingkat SD oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga yang diadakan di SMP negeri 7. Tahap pertama dalam pengorganisasian yang dilakukan kedua sekolah adalah pembentukan panitia yang terbagi menjadi panitia eksternal dan panitia internal, sebagai bukti adanya struktur organisasi. Panitia eksternal bertugas di Dinas Pendidikan sedangkan panitia internal bertugas pada administratif PPDB dan membantu pelayanan tamu PPDB di sekolah. Komunikasi yang digunakan untuk berkoordinasi dalam PPDB adalah komunikasi secara langsung dan tidak langsung.

Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Salatiga meliputi adanya ketentuan pendaftaran siswa yang terbagi pada empat jalur yaitu paling sedikit 50% jalur zonasi, 15% jalur afirmasi, 5% jalur mutasi orang tua, dan paling banyak 10% jalur prestasi. Kedua sekolah menyediakan lokasi khusus untuk melayani tamu dan penyerahan bukti pendaftaran secara online. Pemenuhan tugas kepala sekolah sebagai *leader* yaitu mengarahkan kepada panitia PPDB untuk melakukan sosialisasi ke SD terdekat untuk menginformasikan ketika SMP Negeri 5 masih tersedia kuota pendaftar. Pada tahap pengawasan, kepala sekolah beserta para panitia PPDB mengadakan rapat evaluasi setiap akhir pelayanan dan rapat penyusunan laporan PPDB.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga dalam bentuk monitoring dan evaluasi. Hasil pengawasan menyebutkan ditemukannya faktor penghambat dan pendukung serta evaluasi dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan orang tua pada PPDB bersistem online dan ketidakpastian siswa untuk mendaftar ulang. Kepala sekolah SMP Negeri 7 menambahkan letak geografis sekolah yang jarang ada transportasi umum untuk menuju ke sekolah dan ketidakpastian atau keterlambatan pendaftar untuk melakukan daftar ulang hingga masa daftar ulang selesai. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarana yang memadai, adanya panitia PPDB, dan citra sekolah yang baik di mata masyarakat.

Pola pengorganisasian PPDB berbasis zonasi, baik SMP Negeri 5 maupun SMP Negeri 7 membentuk panitia PPDB sebagai aktor yang akan menjalankan tugas-tugas yang didelegasikan oleh kepala sekolah. Perbedaannya adalah SMP Negeri 7 membentuk tim sukses yang dimaksudkan untuk melakukan promosi lebih awal jauh sebelum pelaksanaan PPDB dimulai. Kegiatan dalam pengorganisasian adalah menentukan sumber daya yang terlibat dalam suatu kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan. Menugaskan seseorang atau kelompok dalam suatu tugas dan fungsi tertentu, dan mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan dengan keluwesan untuk melaksanakan tugas. Pendelegasian tugas sebagai bentuk pembagian tugas yang dihasilkan dari rapat, sangat erat kaitannya dengan spesialisasi kerja. Sebab, jika suatu tugas dikerjakan oleh yang ahlinya atau seseorang yang berkompeten di bidangnya, harapannya tugas tersebut berhasil dan hasilnya efektif. Hal inilah yang mendasari kedua kepala sekolah sebagai penanggung jawab panitia PPDB berbasis zonasi SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 untuk menempatkan stafnya pada posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dibuktikan dari hasil temuan bahwa salah satu faktor pendukung pelaksanaan PPDB dari kedua sekolah adalah adanya tim panitia PPDB. Kedua kepala sekolah membagi dua kelompok dalam panitia PPDB yaitu kelompok panitia yang bertugas di Dinas Pendidikan dan panitia yang bertugas di sekolah. Kepala sekolah menempatkan orang-orang yang ahli dan berkemampuan di bidangnya dalam PPDB berbasis zonasi ini.

Kepala sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 menyebutkan komunikasi sebagai media adanya koordinasi antar panitia PPDB. Komunikasi yang digunakan adalah secara langsung yaitu saat rapat awal PPDB, saat jam pelayanan PPDB, evaluasi atau briefing setelah jam pelayanan selesai dan rapat akhir penyusunan laporan akhir PPDB. Di samping itu komunikasi secara tidak langsung yang digunakan adalah melalui telepon atau via whatsapp. Komunikasi merupakan komponen yang penting dalam sebuah organisasi. Maka dari itu komunikasi adalah bagian yang harus ada pada pengorganisasian. Komunikasi merupakan proses transfer dan penerimaan pesan dari satu orang ke orang lain baik secara langsung atau

tidak langsung, tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan jalur komunikasi terdiri dari komunikasi formal dan nonformal, tertulis dan lisan, personal dan kelompok (Alfian, 2019; Wardhana & Supriyoko, 2019). Berdasarkan hasil temuan pengorganisasian di atas dapat diketahui bahwa kepala sekolah SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 telah menjalankan pengorganisasian dengan cara membentuk orang-orang yang akan menjalankan tugas demi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan sebuah penelitian yang menyebutkan pengorganisasian adalah keseluruhan kegiatan manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung jawab (Rohmah et al., 2021; Wijaya et al., 2020). Di sisi lain sebuah penelitian menambahkan bahwa susunan kepanitiaan PPDB terdiri dari penanggung jawab, ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, seksi kesekretariatan, seksi humas (publikasi), seksi pendaftaran, seksi seleksi, seksi monitoring dan evaluasi, dan seksi keamanan.

Pola pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Pelaksanaan PPDB berbasis zonasi pada SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga mengikuti aturan Pemerintah Kota. Ketentuan sistem zonasi tertera dalam Juknis PPDB Salatiga 2021 dengan landasan hukum Peraturan Walikota Salatiga No. 11 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2022. Kepala sekolah dari SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 mengungkapkan bahwa sekolah mengikuti aturan dari juknis pemerintah selama PPDB berbasis zonasi berlangsung. Dimulai dari proses pendaftaran, hingga proses pendaftaran ulang, kedua sekolah menjalankannya sesuai aturan yang tertera di atas. Jika dianalisis secara mendalam adanya PPDB berbasis zonasi yang menggunakan sistem online ini, memproyeksikan dua sifat kerja dari kedua sekolah, yaitu pekerjaan bersifat pasif dan aktif. Pelaksanaan PPDB oleh segenap panitia PPDB dikatakan pasif betul adanya jika yang dimaksudkan adalah panitia internal atau panitia yang bertugas di dalam sekolah. Namun dapat dikatakan bersifat aktif bagi panitia eksternal atau panitia yang mendapat tugas untuk membantu operasional PPDB di Dinas Kota Salatiga, sebab selama proses pendaftaran yang bergerak aktif adalah admin dari Dinas. Sebaliknya, panitia internal bisa dikatakan aktif, yaitu ketika melakukan pelayanan pendaftaran secara offline.

Adanya pelayanan secara offline merupakan langkah yang dilakukan kedua sekolah untuk menanggulangi adanya orang tua yang tidak memahami proses pendaftaran PPDB yang bersistem online walaupun sebetulnya telah dianjurkan dalam juknis di atas. Hal ini diperjelas dengan adanya temuan bahwa kedua sekolah menyediakan tempat khusus pelayanan tamu PPDB. Fakta ini sejalan dengan sebuah penelitian di SMK Sultan Trenggono Gunungpati Semarang bahwa mekanisme pendaftaran yang ada di sekolah tersebut melalui offline dan online tanpa seleksi, namun pada kenyataannya lebih banyak calon peserta didik yang mendaftar secara offline (Istriyani & Satyarini, 2021). Adanya pelayanan secara offline yang dimaksudkan untuk membantu para orang tua untuk mendaftarkan anaknya merupakan dampak negatif adanya PPDB dengan sistem online. Walaupun pada kenyataannya beberapa orang tua yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan website terbantu adanya sistem online. Namun perlu diketahui bahwa adanya tempat pelayanan ini dimaksudkan oleh pemerintah sebagai tempat penyerahan berkas-berkas untuk diverifikasi oleh panitia. Sejalan dengan itu, terdapat penelitian yang menyebutkan beberapa kelompok yang tidak pro kebijakan zonasi dengan alasan lemahnya partisipasi aktif orang tua dalam literasi sistem zonasi (Syakarofath et al., 2020).

Berdasarkan hasil temuan, pada awal tahun PPDB berbasis zonasi diterapkan kedua sekolah merasa tidak mendapatkan kuota peserta didik sebanyak tahun lalu sebelum kebijakan PPDB berbasis zonasi diterapkan. Jadi dapat diartikan bahwa PPDB berbasis zonasi tahun lalu dikatakan tidak efektif dan tidak efisien. Selain itu respon dari kedua sekolah juga rendah terhadap adanya PPDB berbasis zonasi di tahun pertama. Namun secara perlahan kedua sekolah beradaptasi dan memperbaiki pelaksanaan yang ada dengan berbagai persiapan. SMP Negeri 5 pada tahun melakukan berbagai persiapan seperti melakukan promosi melalui SD terdekat. Sedangkan SMP Negeri 7 melakukan sejumlah promosi dimulai dari promosi ke SD terdekat, promosi melalui media cetak, promosi melalui media sosial (medsos), hingga promosi melalui radio. Menurut peneliti effort yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 5 tidak begitu kompleks seperti halnya SMP Negeri 7 dikarenakan SMP Negeri telah memiliki citra yang baik di masyarakat atau bisa disebut sekolah favorit. Hal ini diungkapkan secara langsung para narasumber SMP Negeri 5. Sedangkan SMP Negeri 7 melakukan sejumlah usaha dengan sangat keras dikarenakan zonanya berada di antara sekolah-sekolah "favorit". Artinya fakta ini mengungkapkan bahwasanya belum terjadi pemerataan pendaftar (Arif, 2020).

Pembahasan

Penyusunan proposal yang dilakukan oleh kedua sekolah di atas merupakan tahapan awal untuk menghadapi pelaksanaan PPDB berbasis zonasi. Hal ini sesuai dengan manajemen perencanaan terhadap peserta didik yang meliputi analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi, penempatan peserta didik, dan 6) pencatatan dan pelaporan (Syakarofath et al., 2020;

Wardhana & Supriyoko, 2019). Petunjuk teknis (Juknis) yang diberikan oleh Pemerintah Kota memberikan arahan agar sekolah-sekolah yang berada di bawah naungannya wajib mengikuti aturan yang ada. Adapun kewenangan yang diberikan kepada sekolah adalah pembentukan panitia PPDB, penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, promosi sekolah, dan pemanfaatan dana BOS. Pengalokasian dana BOS untuk PPDB pada SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 adalah pada akomodasi panitia, kebutuhan promosi seperti pengadaan MMT PPDB, penyediaan ATK, dan konsumsi panitia PPDB. Adapun siswa pendaftar tidak dipungut biaya apapun. Pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan kedua sekolah melalui hasil wawancara dan observasi adalah menyediakan lokasi khusus guna melayani orang tua yang akan berkonsultasi terkait PPDB berbasis zonasi. SMP Negeri 5 memiliki inisiatif dengan menempatkan lokasi tersebut berada di luar ruangan sedangkan SMP Negeri 7 berada di dalam suatu ruangan. Promosi yang dilakukan SMP Negeri 5 berdasarkan hasil wawancara diketahui melalui sosialisasi ke SD terdekat. Sedangkan promosi yang dilakukan oleh SMP Negeri 7 cukup beragam yaitu, sosialisasi ke SD terdekat, sosialisasi melalui media sosial dan media cetak, sosialisasi dan melalui radio. Menariknya, SMP Negeri 7 juga memberikan sebuah kebijakan adanya transportasi antar jemput siswa dan menjadi tuan rumah dari sebuah lomba yang diadakan Dinas Pendidikan. Hal itu dimaksudkan agar masyarakat lebih mengenal SMP Negeri 7 dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Keberagaman inovasi dalam promosi dari kedua sekolah merupakan upaya agar pemerataan angka pendaftar dapat terwujud, sebab promosi dan sosialisasi PPDB merupakan faktor yang menunjang (Mulyani et al., 2020; Riswan & Wibowo, 2020).

Ruang lingkup perencanaan dapat dibagi menjadi tiga macam, yakni: pertama, perencanaan dari dimensi waktu. Perencanaan dari dimensi waktu dapat dibedakan menjadi tiga, yakni; perencanaan jangka panjang (10 tahun), perencanaan jangka menengah (3-8 tahun), dan perencanaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun). Kedua, perencanaan dari dimensi spasial. Perencanaan dari dimensi spasial dapat dibagi menjadi tiga, yakni: perencanaan nasional, perencanaan regional (hubungan sektor sector di wilayah tertentu), dan perencanaan tata ruang (kawasan tertentu baik ekologis/demografis). Ketiga, perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. Perencanaan dari dimensi teknis perencanaan dapat dibagi menjadi lima macam, yakni: perencanaan makro, perencanaan mikro, perencanaan sektoral (karena mempunyai persamaan ciri dan tujuan), perencanaan kawasan, perencanaan proyek (Riswan & Wibowo, 2020; Wijaya et al., 2020). Perencanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 merupakan perencanaan jangka pendek, perencanaan tata ruang, dan perencanaan proyek. Disebut perencanaan jangka pendek dikarenakan proses awal hingga akhir pelaksanaan PPDB tidak mencapai 1 tahun.

Perencanaan tata ruang SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 adalah memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah untuk menunjang keberlangsungan PPDB berbasis zonasi, dan disebut perencanaan proyek karena PPDB berbasis zonasi secara teknis bersifat proyek. Berkaca pada penelitian sebelumnya, penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa dalam perencanaan PPDB berbasis zonasi dimulai dari mulai dari petunjuk teknis, daya tampung, tempat, administrasi, penetapan anggaran, informasi pengumuman PPDB seperti pembuatan banner, brosur, dan lain sebagainya (Nurviana et al., 2021; Safarah & Wibowo, 2018). Perencanaan PPDB berbasis zonasi yang dilakukan SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Salatiga juga merancang PPDB berdasarkan aturan pemerintah yang berlaku (Wardhana & Supriyoko, 2019). Alokasi dana bos pada perencanaan promosi dan sosialisasi merupakan hal yang sah dan wajar, dan dalam perencanaan *budgeting* menentukan kesuksesan implementasi kegiatan (Mahpudin, 2020).

Pola pengawasan PPDB berbasis zonasi, kegiatan pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab PPDB. Kepala sekolah mengadakan rapat evaluasi setiap akhir jam pelayananan PPDB. Rapat ini diadakan selama proses pendaftaran peserta didik baru. Rapat evaluasi dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penilaian terhadap proses pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru apakah sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis), apakah terdapat kekurangan atau kesalahan. Jika memang ada maka dapat terdeteksi untuk diperbaiki secepatnya. Agar pada proses pendaftaran peserta didik baru di kemudian hari maupun tahun ajaran berikutnya dapat berjalan semakin baik. Kepala sekolah juga mengadakan rapat sebelum pembuatan jurnal atau laporan PPDB. Dalam rapat ini dapat pula meminta pendapat atau masukan untuk evaluasi PPDB selanjutnya, dapat pula mendengarkan tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh panitia PPDB. Selain itu, bentuk pengawasan lainnya adalah monitoring atau evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dinas melakukan pemantauan selama proses pelaksanaan PPDB sebagai bentuk kesiagaan jika terjadi masalah atau kendala. Sedangkan evaluasi dilakukan pasca PPDB berakhir dengan melihat laporan akhir yang disusun oleh sekolah. Monitoring yang dilakukan oleh Dinas menggunakan teknik *on desk* dan teknik *on site*.

Teknik *on desk* yaitu pelaksanaan monitoring yang dilakukan melalui pencermatan dari laporan-laporan perkembangan, dan teknik *on site* yaitu dengan melakukan pemantauan secara langsung ke lapangan. Kedua teknik tersebut digabungkan dengan tujuan menghindari terjadinya penyimpangan atau kesalahan sehingga bisa diperbaiki serta memastikan implementasi kebijakan bergerak menuju ke arah tujuan yang dikehendaki. Adanya monitoring dari Dinas Pendidikan dari kedua sekolah di atas memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang menyebutkan proses PPDB online tingkat SMA di Sekayu telah melalui proses pengawasan, yaitu pada saat pelaksanaan dilakukan monitoring/pengawasan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya saat proses pelaksanaan tes tertulis sampai dengan perhitungan akhir yang di tayangkan secara online melalui media sosial (Nurviana et al., 2021; Rohmah et al., 2021).

Impelementasi kebijakan zonasi juga dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Kesamaan faktor penghambat yang dialami kedua sekolah adalah sama-sama tidak mengetahui kepastian siswa mana yang akan mendaftar ulang setelah datanya dimasukkan ke dalam pendaftar. Adapun perbedaannya adalah SMP Negeri 5 merasa masih banyak orang tua yang belum memahami pendaftaran menggunakan sistem online, sedangkan SMP Negeri 7 terkendala karena akses menuju sekolah jarang ditemui transportasi umum. Sedangkan kesamaan faktor pendukung yang dialami dari kedua sekolah adalah sama-sama memiliki fasilitas sekolah yang memadai dan keberadaan panitia PPDB yang mendukung keberhasilan PPDB. Sedangkan perbedaannya terlihat pada SMP Negeri 5 yaitu memiliki citra atau *image* yang bagus di masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan kedua sekolah di atas memiliki kesamaan dengan sebuah penelitian yang menyimpulkan bahwa faktor pendukung keberhasilan PPDB di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, di antaranya adalah sumber daya manusia yang handal, kerjasama yang baik antar semua elemen, fasilitas yang tersedia, dan sistem infomasi. Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan PPDB sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya adalah kurangnya jumlah panitia, pendaftar yang tidak kooperatif, dan menyebarnya informasi yang kurang tepat di masyarakat (Nurjaningsih, 2019; Widyana, 2021).

Temuan ini diperkuat dengan temuan sebelumnya yang menyatakan PPDB akan terlaksana dengan baik apabila pengkomunikasian kebijakan yang baik dan pemberdayaan sumber daya (Rohmah et al., 2021; Widyana, 2021). Faktor pendukung terhadap keberhasilan pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yaitu sarana dan prasarana yang memadai, efisiensi dalam proses sosialisasi menggunakan sosial media, SDM sekolah yang memadai dan akses jaringan internet yang hampir merata di Kota Palopo. Penelitian yang dilakukan ini untuk mengetahui manajemen satuan pendidikan dalam rangka PPDB berbasis zonasi yang diterapkan pada SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 Kota Salatiga. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek hanya sebatas menggambarkan pola manajemen PPDB berbasis zonasi dan pengembangan pola manajemennya. Selain itu, penelitian ini belum diketahui efektivitas, efisiensi, dan dampak terhadap hasil belajar siswa dari pola manajemen PPDB berbasis zonasi yang telah dikembangkan. Penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi merupakan bidang garapan manajemen peserta didik. Manajemen PPDB berbasis zonasi dapat dianalisis dengan teori fungsi manajemen pendidikan milik Terry yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Fakta di lapangan masih ditemukan adanya kesenjangan harapan antara sekolah dengan kebijakan zonasi oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan adanya temuan bahwa hingga saat ini PPDB sistem zonasi masih belum bisa menghapuskan stigma masyarakat tentang sekolah favorit. Selain itu adanya sistem online dalam pendaftaran PPDB menimbulkan beberapa ketidakpahaman orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Namun permasalahan ini tidak patut jika hanya dibebankan pada Pemerintah. Maka dari itu refleksi bagi sekolah adalah harus membuat inovasi-inovasi untuk menyelesaikan dampak tersebut sehingga setiap sekolah dapat beradaptasi dengan PPDB berbasis zonasi. Kepala sekolah selaku manajer dan pemimpin di sekolah hendaknya juga menambah pengetahuannya mengenai manajemen peserta didik baru, manajemen konflik, serta manajemen mutu sekolah.

4. SIMPULAN

Pola Manajemen PPDB berbasis zonasi di SMP Negeri 5 dan SMP Negeri 7 terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Faktor penghambatnya adalah minimnya pengetahuan orang tua pada PPDB bersistem online, ketidakpastian siswa untuk mendaftar ulang, dan letak geografis sekolah yang jarang ada transportasi umum untuk menuju ke sekolah. Sedangkan faktor pendukungnya adalah sarana dan prasarna yang memadai, adanya panitia PPDB, dan citra sekolah yang baik di mata masyarakat.

5. DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, M. A. (2019). Politik Zonasi dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *POLITICON*, 1(2), 118 – 134. <https://doi.org/10.15575/politicon.v1i2.6363>.
- Arif, S. (2020). Pola Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Zonasi di SMPN dan SMAN Pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 17(2), 127–148. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v17i2.3526>.
- Aryantini, Agung, & Dantes. (2018). Kontribusi Implementasi Manajemen Sekolah Berbasis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tri Hita Karana, Kepemimpinan Pelayan Kepala Sekolah, Budaya Sekolah dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 9(2), 99–110. <https://doi.org/10.23887/japi.v9i2.2757>.
- Bakar, K. A. A, Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). Evaluation of admission student policy based on zoning system for acceleration education quality in indonesia. *Journal of Management Info*, 6(2), 19–24. <https://doi.org/10.31580/jmi.v6i2.883>.
- Bakar, Kosasih Ali Abu, Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2019). Evaluation of Admission Student Policy based on Zoning System for Acceleration Education Quality in Indonesia. *Journal of Management Info*, Vol 6(Issue 2), 19–24. <https://doi.org/DOI: 10.31580/jmi.v6i2.883>.
- Bouzarth, E. L, Forrester, R., Hutson, K. R., & Reddoch, L. (2017). Assigning students to schools to minimize both transportation costs and socioeconomic variation between schools. *Socio-Economic Planning Sciences Xxx*, 1(8). <https://doi.org/10.1016/j.seps.2017.09.001>.
- Bouzarth, Elizabeth L., Forrester, R., Hutson, K. R., & Reddoch, L. (2017). Assigning students to schools to minimize both transportation costs and socioeconomic variation between schools. *Socio-Economic Planning Sciences xxx*, 1–8.
- Habiby, W. N., & Fiatur, S. N. (2020). Persepsi Masyarakat Dan Dampak Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Akses Sekolah Jenjang Sekolah Dasar Di Kecamatan Serengan Kota Surakarta. *Profesi Pendidikan Dasar*, 6(2). <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i2.10151>.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 73–86. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i3.181>.
- Hanifah, H. (2018). Penerapan Manajemen Program Pembelajaran Bagi Guru Paud Dalam Meningkatkan Kinerja Pendidik. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 1(3), 24. <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v1i3.1102>.
- Harususilo, Y. E. (2019). 9 Poin Buka-bukaan Mendikbud Soal Sistem Zonasi dan PPDB 2019 - Kompas.com. Kompas.
- Hoerudin, C. W. (2019). Evaluation of new student admission policy based on zonation system in Bandung City. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2), 351–361. <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2.5483>.
- Istriyani, W., & Satyarini, M. D. (2021). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru di SMK Sultan Trenggono Gunungpati Semarang. *Journal of Economic Education and Entrepreneurship*, 2(1), 38–43. <https://doi.org/10.31331/jee.v2i1.1677>.
- Lisnawati, R. (2017). Fungsi Manajemen Kepala Sekolah, Motivasi, Dan Kinerja Guru. *Jurnal Pendidikan (Teori Dan Praktik)*, 2(2). <https://doi.org/10.26740/jp.v2n2.p143-149>.
- Mahpudin, M. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2020.006.02.2>.
- Mohammad Thoha, H. A., & Ghazali. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302>.
- Mulyani, S. V, Tobari, & Houtman. (2020). Manajemen Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi. *Jambura Journal of Educational Management*, 1(2), 71–84. <https://doi.org/10.37411/jjem.v1i2.162>.
- Nurjaningsih, S. T. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2), 126–138.
- Nurviana, N., Hawi, A., & Maryamah, M. (2021). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Tingkat Sekolah Menengah Atas di Sekayu Tahun Pelajaran 2021/2022. , 3(1), . [https://doi.org/.JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management, 3\(1\), 81–104. <https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.68>](https://doi.org/.JIEMAN: Journal of Islamic Educational Management, 3(1), 81-104. https://doi.org/10.35719/jieman.v3i1.68).
- Perdana, N. S. (2019). Implementasi PPDB zonasi dalam upaya pemerataan akses dan mutu pendidikan. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 3(1), 78–92. <https://doi.org/10.32529/glasser.v%vi%i.186>.
- Perdana, Novrian Satria. (2018). Implementasi Peranan Ekosistem Pendidikan Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(2).

- <https://doi.org/10.24176/re.v8i2.2358>.
- Pöder, K., Lauri, T., & Veski, A. (2017). Does school admission by zoning affect educational inequality? A study of family background effect in Estonia, Finland, and Sweden. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 6(6), 668–688. <https://doi.org/10.1080/00313831.2016.1173094>.
- Puspitasari, Y., Tobari, & Kesumawati, N. (2021). Pengaruh Manajemen Kepala Sekolah dan Profesionalisme Guru Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*, 6(1), 88–99. <https://doi.org/10.31851/jmksp.v6i1.4036>.
- Riswan, R., & Wibowo, U. B. (2020). The Impact of Implementing a Zonasi System on the Acceptance of New Students in Junior High School in Yogyakarta. *sia Pacific Journal of Management and Education (APJME)*, 3(3), 37–41. <https://doi.org/10.32535/apjme.v3i3.966>.
- Rohmah, S., Wahyudi, W., & Pamungkas, F. (2021). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.21580/jawda.v1i1.2020.6704>.
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2018). Program Zonasi Di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(1), 115–130. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.
- Wardhana, L. P., & Supriyoko, S. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Online Berbasis Zonasi, Prestasi dan Perpindahan. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(2), 228–235. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i2.5063>.
- Widyana, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 35–42. <https://doi.org/10.46730/jkp.v12i1.7923>.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. *JUPIIS (JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL)*, 12(1), 162 – 177. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.16463>.